PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SPI, KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI PADA OPD KABUPATEN PATI)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Disusun Oleh :

Romdlonah Za'imatul Mawaddah

NIM : 31401800154

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SPI, KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA OPD KABUPATEN PATI)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

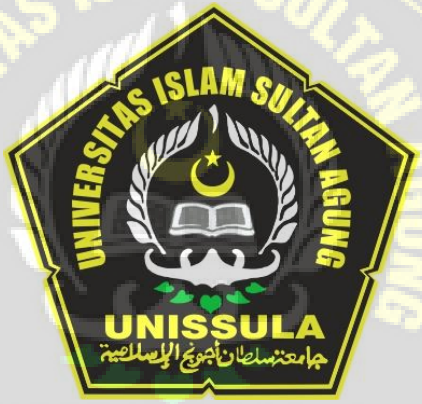

Disusun Oleh :

Romdlonah Za'imatul Mawaddah

NIM : 31401800154

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

SKRIPSI

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SPI, KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI PADA OPD KABUPATEN PATI)

Disusun Oleh :

Romdlonah Za'imatul Mawaddah

NIM : 31401800154

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian usulan penelitian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Semarang, 07 Juni 2022

Pembimbing

Hendri Setyawan, SE., MPA

NIK. 211406019

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SPI, KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI PADA OPD KABUPATEN PATI)

Disusun Oleh :

Romdlonah Za'imatul Mawaddah

NIM : 31401800154

Telah dipertahankan didepan penguji

pada tanggal 01 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing	Penguji 1
Hendri Setyawan, SE, MPA	**Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA**
NIK. 211406019	**NIK. 210493034**

Penguji 2

Dr. Sri Anik, SE, M.Si
NIK. 210493033

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 01 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CRS
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan dibawah ini;

Nama : Romdlonah Za'imatul Mawaddah

Nim : 31401800154

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang bejudul:

"PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SPI, KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA OPD KABUPATEN PATI)"

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan oranglain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 05 Juli 2022

Yang menyatakan,

Romdlonah Za'imatul M

NIM. 31401800154

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romdlonah Za'imatul Mawaddah

NIM : 31401800154

Program Studi : Akuntansi

Fakutas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : romdlonah@std.unissula.ac.id

Dengan ini menyatakan karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul **"PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SPI, KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA OPD KABUPATEN PATI)"** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hkum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Juli 2022

Yang menyatakan,

Romdlonah Za'imatul M

NIM. 31401800154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Do anything for the best in your life.

PERSEMBAHAN:

Anyone.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that can affect the quality of financial statements at OPD Pati Regency, in this study using the independent variables of Government Accounting Standards, SPI Accounting Staff Competence, and Utilization of Information Technology, the dependent variable is Financial Report Quality. The method used in this research is using primary research with saturated sample technique, data collection using a questionnaire filled out by respondents, namely PPK-OPD and treasurer of expenditures / assistant treasurer of expenditure at OPD Pati Regency. The results of this study indicate that Government Accounting Standards and Internal Control Systems have a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements, Competence of Accounting Staff and Utilization of Information Technology have no significant effect on the Quality of Financial Statements..

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control System, Competence of Accounting Staff, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Reports.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati, dalam peneltian ini menggunakan variabel independen Standar Akuntansi Pemerintah, SPI kompetensi Staf Akuntani, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian primer dengan teknik sampel jenuh, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden yaitu PPK-OPD dan Bendahara penegeluaran/pembantu bendahara penegeluaran pada OPD Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualias Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Staf Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan.

INTI SARI

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan disuatu daerah dirasa penting kaena dari laporan keuangan tersebut dapat mencerminkan kinerja instansi tersebut, laporan keuangan yang berkualitas juga menjadi bekal untuk penilaian bagi auditor dalam pengujian di depan BPK yang nantinya akan mendapatkan predikat tersendiri. Penelitian ini berangkat dari gap research oleh peneliti sebelumnya.

Data penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner dengan sampel jenuh yang diisi oleh responden di 49 OPD Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Kompeensi Staf Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memeiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI, Kompetensi Staf Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan"**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi banyak sekali mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi segala kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi dalam menjalani perkuliahan.
3. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CRS selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Hendri Setiawan, SE., MPA., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberi arahan, saran, serta

bimbingan pada awal penyusunan Pra Skripsi sampai dengan akhir skripsi ini.

5. Bapak Dr. Chrisna Suhendi., SE., MBA, Ak., CA, Bapak Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si dan Bu Dr. Sri Anik, SE., M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan dan koreksi dalam ujian pra skripsi dan Ujian Hasil Skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
7. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan Keluarga Besar saya yang telah memberikan semangat dan menanamkan arti kehidupan yang sebenarnya dan selalu mendoakan sehingga dapat berkuliah dan menyelesaikan tugas – tugas perkuliahan dengan baik.
8. Semua keluarga besar UKM Resimen Mahasiswa 908/SW Unissula yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak lain yang telah meluangkan waktu dan memberi semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.

Semarang, 07 Juni 2022

Penulis

Romdlonah Za'imatul Mawaddah
NIM. 31401800154

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Pertanyaan Penelitian 12
1.4 Tujuan Penelitian 12
1.5 Manfaat Penelitian 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA 14
2.1 Landasan Teori 14
2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*) 14
2.2 Variabel Penelitian 21
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan 21
2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah 22
2.2.3 Sistem Pengendalian *Intern* 23
2.2.4 Kompetensi Staf Akuntansi 24
2.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi 25
2.3 Penelitian Terdahulu 27
2.4 Kerangka Penelitian 31
2.5 Pengembangan Hipotesis 32
BAB III METODE PENELITIAAN 37
3.1 Jenis Penelitian 37
3.2 Populasi dan Sampel 37
3.2.1 Populasi 37

3.2.2 Sampel 38
3.3 Sumber dan Jenis Data 38
3.4 Metode Pengumpulan Data 38
3.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Indikator 39
3.5.1 Variabel 39
3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable 39
3.6 Teknik Analisis 44
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 45
3.6.2 Uji Kualitas Data 45
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 46
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 47
3.6.5 Uji Kebaikan Model 48
3.6.6 Pengujian Hipotesis 49
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN 51
4.1 Hasil Penelitian 51
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pati 51
4.1.2 Data Penelitian 52
4.2 Analis Data 57
4.2.1 Analis Statistik Deskriptif 57
4.2.2 Uji Kualitas Data 63
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 66
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 68
4.2.5 Uji Kebaikan Model 70
4.2.6 Pengujian Hipotesis 72
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 73
BAB V PENUTUP 80
5.1 Simpulan 80
5.2 Implikasi 81
5.3 Keterbatasan Penelitian 83
5.4 Agenda Penelitian Mendatang 83
DAFTAR PUSTAKA 85
Lampiran 1 Kuesioner Responden 88

Lampiran 2 Tabel Tabulasi Data Responden 97
Lampiran 3 Hasil Data Penyebaran Kuesioner 112
Lampiran 4 Hasil Identitas Responden 113
Lampiran 5 Hasil Analisis Deskriptif 115
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas 117
Lampiran 7 Hasil Uji Realibalitas 125
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas 126
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas 127
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas 128
Lampiran 11 Hasil Uji Linier berganda dan Uji T 129
Lampiran 12 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 130
Lampiran 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi *(Adjust R Square)* 131
Lampiran 14 Surat Ijin Penelitian 132
Lampiran 15 Surat Pernyataan Penelitian 134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini Audit 2012-2022 4

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 27

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 41

Tabel 4. 1 Data Penyebaran Kuesioner 53

Tabel 4. 2 Identitas Responden 54

Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 57

Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 58

Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel SPI (X2) 59

Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kompetensi Staf Akuntansi (X3) 61

Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) 62

Tabel 4. 8 Uji Validitas 63

Tabel 4. 9 Uji Realibilitas 66

Tabel 4. 10 Uji Normalitas 66

Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas 67

Tabel 4. 12 Uji Heteroskedastisitas 68

Tabel 4. 13 Uji Regresi Linear Berganda 68

Tabel 4. 14 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 70

Tabel 4. 15 Uji Koefisien Determinasi (Adjust R Square) 71

Tabel 4. 16 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat, setelah terjadinya reformasi di tahun 1998 yang melahirkan kebijakan kontemporer dari pemerintah Republik Indonesia yang berdampak pada akuntansi sektor publik sehingga publik menaruh perhatian lebih pada praktik akuntansi di lembaga pemerintahan. Dengan demikian tuntutan dari akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban pertangungjawaban atas kinerja pemerintah kepada publik. Lembaga pemerintah mempunyai keharusan untuk memberikan informasi terkait kinerjanya kepada publik, karena publik mempunyai harapan yang besar terhadap akuntabilitas pemerintahan.

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan menyajikan informasi pada posisi keuangan, aktivitas kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang mempunyai efek dominan dalam pengambilan keputusan akuntansi. Hal tersebut telah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003) menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disajikan sesuai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta diatur dalam (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Menurut penelitian (Yaqin & Jatmiko, 2018) menjelaskan bahwa penyampaian dan pengungkapan laporan pertanggungjawaban

dalam bentuk laporan keuangan merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, dengan arti bahwa laporan keuangan pemerintah harus berkarakteristik kualitatif. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan pemerintah bergantung pada ukuran yang normatif, sehingga dapat tercapainya tujuan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Tolak ukur dalam menilai laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan memperhatikan opini yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan maka dapat diasumsikan bahwa instansi tersebut sehat dan telah memenuhi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas menjadi momok yang penting, karena semua informasi yang ada didalam laporan keuangan akan menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan akuntansi. Dengan hal ini penyajian laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat digunakan oleh semua pihak pengguna laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dan berlaku umum, serta siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai standar yang berlaku.

Dalam setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan menerima penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk membuktikan antara kesesuaian karakteristik laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan. Penilaian opini tersebut meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan catatan (*record*) informasi keuangan yang dapat menggambarkan kinerja suatu instansi selama periode akuntansi. Laporan keuangan yang telah selesai disusun selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian hasilnya akan disampaikan pada DPR/DPRD dan masyarakat umum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) dengan objek penelitian di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa ada beberapa instansi pemerintah daerah telah mendapat opini *disclaimer* dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), dikarenakan BPK menemui kesulitan dalam pengujian untuk menerapkan prosedur audit di beberapa pos pada laporan keuangan yang tidak berdasarkan SAP, sehingga laporan keuangan tersebut tidak berkualitas.

Berdasarkan pemeriksaan BPK OPD Kabupaten Pati tahun 2012-2020 menunjukkan bahwa OPD Kabupaten Pati cukup baik dalam menyajikan laporan keuangan karena 6 kali berturu-turut dari tahun 2015-2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwasanya ditahun 2015 Kabupaten Pati sempat mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) namun diperbaiki untuk memperoleh opini yang sempurna yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian ditahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa koreksi dan rekomendasi dari BPK.

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini Audit 2012-2022

Tahun	Opini
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : (BPK Perwakilan Provinsi Jateng, n.d.)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari (Rahmawati, 2017) menjelaskan bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Pati sempat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun adanya rekomendasi untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu adanya perbaikan dengan waktu paling lambat 2 bulan. Peristiwa ini terjadi karena OPD menugaskan sumber daya manusia yang kurang berkompetensi dalam bidang akuntansi yaitu ditemukan dalam catatan akun penataan aset tetap belum dipindahkan pada

inventarisasi dan penilaian dengan adanya hutang obat pemerintah pada RSUD RAA Sewondo.

Kemudian pada tahun 2015-2020 Kabupaten Pati mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP) yang ke-enam kalinya, tetapi pada tahun 2020 terdapat koreksi dan rekomendasi dari BPK sebagai auditor eksternal pemerintahan menjelaskan bahwa BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian *intern* maupun ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu BBM atas pekerjaan normalisasi sungai secara swaloka pada Dinas PUTR tidak sah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 423,06 juta dan kurangnya volume 8 paket pekerjaan pada Dinas PUTR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 564,00 juta. Dari peristiwa tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Pati untuk memerintahkan Kepala Dinas PUTR mengembalikan dan mempetanggung jawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan selanjutnya untuk disetorkan ke kas daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021).

Implementasi Standar Akuntansi pada tata kelola keuangan pemerintah yang sesuai dengan aturan merupakan kewajiban bagi seluruh negara di dunia termasuk indonesia (Sihite & Holiawati, 2017). Dalam merealisasikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP diperlukan sistem yang kokoh dengan lembaga yang berlandaskan peraturan didalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 yang menitik beratkan keuangan negara dengan mensyaratkan bentuk, dan laporan pertanggung jawaban disusun serta disajikan selaras sesuai penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Penyusunan Laporan keuangan yang baik dan benar dengan dilengkapi pemahaman yang mendalam oleh pihak pengelola keuangan pada Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Namun pada fenomena terkait kualitas laporan keuangan pemerintah di negara Indonesia masih landai yaitu ditandai dengan minimnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, kurang spesifik pada Sistem Pengendalian *Intern*, kurangnya Sumber Daya pada Kompentensi Staf Akuntansi, dan kurang efektif pada Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Hal pertama yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan acauan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. SAP dinyatakan dengan bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dengan penyusunannya berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan ataupun kinerja selama periode tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang selaras dengan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2005) dengan pencatatan menggunakan akuntansi berbasis kas yang kemudian diganti dengan sistem pencatatan akuntansi bebasis akrual bersarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Beberapa penelitian telah dilakukakan pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dari hasil penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan yang berbeda yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) menunujukkan bahwa penerapan

standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yaqin & Jatmiko, 2018) mengungkapkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriansyah et al., 2020) menuliskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal kedua yang mungkin berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian *Intern* (SPI). Keterlibatan sistem pengendalian *intern* ini bermanfaat dalam menyangkal sebuah data dan informasi laporan keuangan yang tidak akurat. Berdasar pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) bahwa Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian *intern* dijalankan untuk menjaga dan melindungi kekayaan informasi dari sebuah entitas dalam meninjau keamanan dan keandalan data akuntansi, serta dapat meningkatkan efesiensi agar terciptanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Admaja, 2020). Namun pada faktanya sering terjadi penyimpangan pada kinerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik sehingga dapat memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Penelitian terdahulu terkait pengujian variabel Sistem Pengendalian *Intern* terhadap kualitas laporan keuangan memperlihatkan bahwa adanya perbedaan

antara penelitian yang dilakukan oleh (Hartono & Ramdany, 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (A. Rahmawati et al., 2018) membuktikkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan ditemukan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh (Maesaroh, 2018) menuliskan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ketiga yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Staf Akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten khusus pada bidang dan disiplin ilmu akuntansi agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi staf akuntansi tersebut meliputi pengetahuan, pengalaman, kemampuan, keterampilan dan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban dan fungsinya. Namun dalam praktiknya dapat dijumpai SDM dengan pendidikan akhir SMA dan jajaranya mengemban tugas untuk menyusunan laporan keuangan pemerintah, yang ditinjau secara latar belakang kompetensi belum sepenuhnya menguasai dalam penyusuan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian terdahulu pada variabel Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan mempunyai beberapa hasil kesimpulan yang berbeda yaitu dalam penelitian dari saudari (Mahardini & Miranti, 2018) menuliskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan Pemerintah di Provinsi Banten. Dalam artian semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Laila & Agustini, 2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, yaitu dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai bagian keuangan berlatar belakang tidak dari disiplin ilmu akuntansi.

Hal keempat yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2005) bahwa pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab penuh atas perjalanan dan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pengelolaan serta penyampaian informasi keuangan daerah kepada publik. Dalam hal ini diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pegawai atau aparatur pemerintah untuk mengantisipasi dan menemukan berbagai penyimpangan ataupun kesalahan yang terjadi selama proses kinerja suatu instansi secara cepat. Namun dalam faktanya, pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh belum maksimal dilakukan karena adanya keterbatasan dana belanja properti teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak yang dipakai, pemutkhiran data serta kondisi sumber daya manusia yang kurang mampu dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal cenderung akan memengaruhi

pengimplementasian pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif merupakan salah satu faktor terciptanya kualitas laporan keuangan, dimana semua proses penyusunan laporan keuangan mengunakan alat digital dan komputerisasi yang dapat membantu proses kinerja para pegawai ataupun aparatur pemerintah menjadi lebih cepat dan akurat.

Hasil penelitian sebelumnya pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan ditemukan perbedaan atas penelitian yang dilakukan oleh (Maesaroh, 2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dapat memperkuat pengaruh kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riandani, 2017) membuktikkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriansyah et al., 2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) terkait kualitas laporan keuangan pemerintah di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian *intern* (SPI) dan kompetensi staf akuntansi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian *intern* (SPI), kompetensi staf akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk mengerti serta mengetahui tentang seberapa efektif penerapan sistem akuntansi pemerintah, kompetensi staf akuntansi berpengaruh dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas serta keterlibatan sistem pengendalian *intern* dan pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi salah satu cara untuk menjaga kekayaan aset instansi dan dapat membantu pegawai atau aparatur pemerintah dalam kinerjanya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) dimana dalam penelitian ini ada penambahan variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memperkuat penelitian ini. Tempat pelaksanaan penelitian juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati, karena berdasarkan dengan fenomena yang terjadi pada OPD Kabupaten Pati dengan pertimbangan dari hasil audit BPK yang ditemukan adanya kelemahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat *gap research* dengan hasil temuan yang tidak konsisten mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian *intern*, kompetensi staf akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : "*Bagaimana Standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi staf akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaen Pati?*"

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan gap research yang telah dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati ?
2. Apakah sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati ?
3. Apakah kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati ?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati.

3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif serta inovatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu:

1. Pihak pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah tentang hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Pihak masyarakat diharapkan dapat dijadikan wawasan dan pandangan baru terkait fenomena-fenomena laporan keuangan yang terjadi di pemerintahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi ialah teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan yang saling terjalin antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *principal* dan pihak lainya sebagai *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberi amanah dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas segala aktivitas kegiatan yang didasari dengan kontrak perjanjian antara dua belah pihak. Sedangkan pihak yang menerima dan menjalankan amanah sesuai kehendak *principal* disebut dengan *agent*. Teori keagenan mengemukakan bahwa agen bersikap *oportunis* dan cenderung tidak menyukai risiko. Menurut (Kurniawansyah, 2018) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul ketika *principal* dan *agent* mempunyai tujuan yang berbeda, sehingga *principal* tidak mengetahui bahwasanya *agent* telah bekerja sesuai dengan kesepakatan atau tidak, oleh karena itu muncul *Moral Hazard* yang berarti bahwa *agent* tidak seterusnya betindak sesuai dengan keinginan *principal* dalam pekerjaannya yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Implementasi teori agensi didalam organisasi sektor publik yaitu sebagai pedoman dalam praktik pelaporan keuangan, dimana pemerintah yang berperan sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan transparansi akuntabilitas. Pemerintah berkewajiban untuk mampu membuat keputusan ekonomi, sosial, dan

politik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Riandani, 2017) menjelaskan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah yang berperan sebagai agen tidak hanya melakukan penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga harus mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Sehingga akan tercapainya tujuan pemerintah dalam mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas baik di lembaga pusat maupun daerah. Masalah keagenan terjadi ketika eksekutif (*agent*) memulai dengan memaksimalkan kepentingan pribadi dan kewenangan yang dimiliki dengan diawali dari proses penganggaran, pembuatan keputusan,sampai dengan pelaporan yang menunujukkan kewajaran suatu laporan keuangan bahwa hal tersebut telah mencapai kinerja yang berjalan secara baik serta mempunyai persepsi dimata legislatif dan rakyat (Sihite & Holiawati, 2017).

Laporan keuangan pemerintah merupakan *output* dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disusun sesuai dengan aturan standar akuntansi pemerintah yang berlaku (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan pelaksanaan finansial dengan komponen sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas

6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pemerintah yang berperan sebagai agen mempunyai tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan karena dalam menciptakan sebuah laporan keuangan yang berkualitas memerlukan beberapa prosedur dimulai dari menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan aturan standar akuntansi pemerintah dengan pengoperasiannya menggunakan komputer yang dilakukan oleh orang berkompeten dibidang akuntansi, serta melibatkan pengendalian *intern* sebagai proses yang essensial, sehingga *principal* akan menerima sebuah laporan keuangan berkualitas yang akan dipakai oleh pihak *principal* sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada aturan dan standar yang berlaku.

Pengertian Audit (Pemeriksaan) pada Organisasi Sektor Publik

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No. 01 Tahun 2017 tentang standar pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 1 butir (8) yaitu "Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".

Mekanisme pemeriksaan atau auditing merupakan sebuah metode yang dapat meningkatkan arti akuntabilitas dalam sebuah badan pengelola aktiva negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan organisasi sektor pemerintahan. Pengujian yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan bertujuan untuk

memberikan opini yang jujur serta relevan terhadap hasil operasi, keberadaan posisi keuangan, dan arus kas yang telah disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Pelaksanaan audit di organisasi sektor publik merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam mempertanggungj awabkan dana yang telah digunakan selama periode tertentu sehingga dapat terlihat seberapa besar instansi mampu memanfaatkan dan mengelola dana tersebut.

Jenis-Jenis Auditor Sektor Publik

1. Auditor Internal

   Auditor internal merupakan pihak audit dari dalam organisasi/instansi yang berperan terhadap kualitas pengungkapan informasi dan sistem pengendalian internal. Dalam organisasi sektor publik pemerintahan daerah, yang bertugas sebagai auditor internal yaitu Aparat Pengawasan Internal (APIP) daerah yang bersangkutan. APIP memiliki tanggungjawab langsung untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi kepada Bupati atau Walikota.

2. Auditor Eksternal

   Auditor ekternal adalah auditor yang berasal dari pihak luar organisasi/instansi mempunyai peran untuk memberikan opini kewajaran terkait laporan keuangan. Auditor eksternal di jalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas dalam pemeriksaan keuangan negara termasuk keuangan daerah.

Opini Audit Dalam Organisasi Sektor Publik

Berdasarkan (Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 2004) dalam Pasal 1 butir (11) memaparkan bahwa Opini audit merupakan pernyataan profesional yang dikeluarkan oleh pihak audit sebagai bentuk kesimpulan pengujian terkait tingkat level kewajaran suatu informasi yang telah disajikan di dalam laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian opini yang di klasifikasikan terdiri dari lima jenis opini audit yaitu sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualifed Opinion*)

   Opini ini dikeluarkan oleh auditor jika suatu organisasi menyajikan laporan keuangan secara wajar dengan semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Artinya auditor dalam pengujiannya tidak menemukan kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan yang berupa tidak ada pengecualian terhadap kewajaran, tidak adanya batasan-batasan dalam lingkup audit, dan konsisten dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang dibutuhkan oleh semua pihak meliputi pihak klien, pihak pengguna informasi laporan keuangan, dan pihak auditor.

2. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

   Auditor memberikan opini tidak wajar sebagai hasil dari proses pengujiannya terhadap laporan keuangan bahwa auditor menemukan ketidak wajaran atas penyajian laporan keuangan. Dalam mengeluarkan opini ini, auditor diwajibkan memberi alasan dan penjelasan yang mendukung. Sebagai

contoh jika pihak auditor dalam pemeriksaanya menerima keseluruhan laporan keuangan yang tidak menyajikan laporan posisi keuangan dan arus kas entitas secara wajar serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

   Opini ini merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor dengan dasar terjadinya atas keadaan tertentu yang tidak mempunyai efek langsung terhadap pendapat yang wajar. Auditor memberikan opini ini harus menyertakan paragraf penjelas terkait dengan keadaan tertentu seperti adanya pengaruh ketidak pastian terhadap kejadian dimasa depan dengan hasil tidak dapat diperkirakan. Selain itu tidak adanya aturan terstruktur laporan keuangan sehingga dapat terdeteksi adanya penyimpangan laporan keuangan dari SAP yang berlaku umum.

4. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

   Opini ini diberikan ketika dalam pengujiannya auditor mendapatkan dua kemungkinan yaitu memperoleh bukti-bukti yang tepat dan cukup untuk membuat kesimpulan bahwa adanya kesalahan penyajian secara individual maupun agregasi, atau auditor mendapatkan bukti yang cukup untuk membuat kesimpulan karena didapati adanya kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi.

5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

   Dalam pengujian laporan keuangan auditor mendapatkan pembatasan terhadap lingkup audit. Oleh karena itu auditor tidak menemukan bukti-bukti terkait tentang kewajaran laporan auditnya. Selain itu auditor meyakini bahwa

adanya penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berterima umum dan menyertakan alasan mengenai audit yang tidak berdasarkan standar yang berlaku. Sehingga auditor tidak memberikan opini tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan dan sah memberikan pendapat tidak penuh atas unsur elemen tertentu dalam laporan keuangan. Tiga hal langkah yang dapat diambil oleh auditor jika dalam memberikan opini dipengaruhi oleh lingkup audit yang tidak memungkinkan auditor dalam memberikan opini yaitu :

1. Pengubahan kalimat dari kata pengantar "kami telah mengaudit neraca perusahaan..." menjadi kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan..." dengan tujuan untuk memaparkan bahwa auditor telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas audit namun tidak sesuai yang syarat dalam standar pekerjaan lapangan yang berlaku.
2. Tidak dicantumkan lingkup audit didalam laporan audit karena adanya pembatasan lingkup audit yang berakibat bahwa auditor tidak dapat menyatakan audit yang telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
3. Menjelaskan alasan dalam suatu paragraf yang menyebabkan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas pengujian laporan keuangan.

Keterkaitan teori agensi dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mempertanggung jawabkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dengan melibatkan beberapa variabel yang

diharapkan mampu mencapai tujuan pelayanan yang prima sehingga kesejahteraan publik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika semua informasi yang ada didalamnya dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak pengguna loporan keuangan. Artinya didalam proses penyusunan laporan keuangan sampai dengan pengambilan keputusan akuntansi terbebas dari penyimpangan dan kesalahan yang material. Menurut (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Relevan, laporan keuangan bisa dianggap relevan karena didalam laporan keuangan terdapat informasi yang dapat memberi pengaruh *user* dalam membuatan keputusan dan membantu untuk mengevaluasi peristiwa dimasa lalu atau masa sekarang, serta dapat mmprediksikan peristiwa dimasa yang akan datang.
2. Andal, keandalan laporan keuangan bisa dilihat dari informasi yang didalamnya memiliki sifat tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, disajikan secara fakta, dan bisa diverifikasi. Sebuah laporan keuangan yang sajian informasinya secara relevan saja hakikatnya laporan keuangan tersebut tidak andal, sehingga dapat menyesatkan bagi para *user*.
3. Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika didalamnya termuat informasi laporan keuangan yang dapat digunakan untuk

perbandingan secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dengan membandingkan laporan keuangan dari tahun ketahun dengan syarat entitas tersebut menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Sedangkan secara ekternal artinya laporan keuangan bisa dibandingkan dengan entitas lain dengan syarat entitas tersebut menerapkan kebijakan yang sama. Ketika suatu entitas akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari yang sebelumnya maka perubahan akan diungkap pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami, Laporan keuangan dapat dipahami oleh semua penguna yaitu jika terdapat suatu informasi yang dapat diterima sesuai dengan tolak ukur batas pemahaman para pengguna. Agar laporan keuangan dapat diterima oleh pengguna, maka pengguna laporan keuangan diharapkan mampu mengerti serta memahami maksud dari isi informasi yang ada didalam laporan keuangan.

Apabila karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan sudah terpenuhi artinya pemerintah daerah telah menerapkan aturan yang berlaku dan berusaha mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah (SAP) menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah agar dapat menghasilkan penyajian informasi laporan keuangan yang andal dan relevan. Berdasar pada (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2005) yang berisi peraturan pencatatan akuntansi menggunakan basis kas menuju akrual dengan

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual, ketentuan tersebut dicabut dan digantikan dengan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) yang memuat ketentuan pencatatan akuntansi berbasis akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan APBN/APBD.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman sistem pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintah yang disusun tidak berdasar pada peraturan yang ada didalam SAP maka laporan keuangan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2.2.3 Sistem Pengendalian *Intern*

Sistem Pengendalian *Intern* merupakan proses pengawasan, arahan, serta pengukuran yang dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang disusun untuk memudahkan serta diharapkan dapat membantu suatu organisasi ataupun instansi dalam pencapaian *goals* dan dapat beperan sebagai pencegahan serta pendeteksian kecurangan (*fraud*) untuk melindungi instansi dari ancaman yang berwujud maupun tidak berwujud. Terdapat kebijakan didalam sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang berkualitas yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi diwajibkan untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan pengendalian yang dapat memberi contoh positif yang dapat memberikan efek yang baik untuk pegawai/aparatur pemerintahan dibawahnya.

2. Penilaian Risiko

   Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko secara rutin meliputi identifikasi risiko dan penilaian risiko untuk menetapkan tujuan pada kegiatan instansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Aktivitas pengendalian

   Pimpinan instansi wajib melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari sifat tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

4. Pemantauan

   Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan pengendalian *intern* dengan melakukan pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil audit.

5. Informasi dan komunikasi

   Instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggunjawaban dengan tepat waktu dan siap untuk dilakukan pemeriksaan audit.

2.2.4 Kompetensi Staf Akuntansi

Kompetensi merupakan acauan untuk capaian kinerja tertinggi dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara kompleks (Apriansyah et al., 2020). Kompetensi staf akuntansi merupakan kemampuan yang terukur dan kompeten yang dimiliki oleh pegawai untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya yang telah diamanahkan untuk mencapai tujuan secara efektif

dan efisien. Staf akuntansi yang berkompeten dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena staf akunansi memiliki lingkup pengetahuan dan pemahaman bidang khusus disiplin ilmu dalam penyajian serta pelaporan keuangan yang dapat terselesaikan dengan baik dan kompleks serta dengan waktu yang efisien.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, OPD harus mampu memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidang akuntansi dengan dibuktikan telah mengikuti pelatihan serta mempunyai pengalaman dalam menunjang kinerjanya.

2.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah menunjukkan bahwa setiap pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan tujuan menambah kemampauan dalam mengelola dan menyalurkan informasi keuangan agar terciptanya pelayanan publik secara optimal. Berdasar pada (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah) menjelaskan bahwa peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah alam penyusunan APBD dan pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu agar terciptanya kepastian hukum.

Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 dan Nomor 65 tahun 2010 ialah adanya situs web online pemerintah yang dikenal dengan istilah

E-Goverment (E-Gov) yang mempunyai banyak manfaat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sebuah informasi.

Terdapat tiga model dalam penyampaian informasi yaitu :

1. *Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)*

   Sistem layanan publik ini dengan konsep sistem informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, contoh : Layanan pembayaran pajak online, layanan jaminan sosial, layanan dokumen pribadi seperti akta kelahiran, perkawinan, dan aplikasi paspor.

2. *Government-to-Business (G2B)*

   Layanan transaksi elektronik yang berisi informasi yang dibutuhkan untuk kalangan pebisnis agar memudahkan dalam bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya pada aplikasi sistem *e-producement* yaitu layanan pendaftaran perusahaan, hak paten perdagangan, pajak perseroan, dan lain lain.

3. *Government-to-Government (G2C)*

   Komunikasi informasi yang dilakukan secara online antar lembaga pemerintahan dengan data yang berintegritas. Contohnya yaitu pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, konsultasi secara online, dan pendidikan secara *virtual.*

Pemanfaatan teknologi bagi staf akuntansi yaitu untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan dan tugas lainnya yang dapat diukur berdasarkan keseriusan niat, ketekunan, serta kuantitas aplikasi yang dipakai sebagai penerapan dalam pemanfaatan perangkat lunak yang dapat menghasilkan

output keandalan laporan keuangan serta dengan didukung keahlian staf akuntansi didalam proses mengoperasikannya.

Kemajuan teknologi informasi dalam pemprosesan data dari sistem manual ke komputer memiliki pengaruh yang besar di bidang akuntansi, salah satunya yaitu memudahkan kinerja staf akuntansi dalam mengubah data akuntansi menjadi sebuah informasi yang dikemudian hari dapat dipakai oleh pihak auditor dalam melaksanakan tugasnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai variabel pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Hasil
1.	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Sihite & Holiawati, 2017)	1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Kompetensi Staf akuntansi berpengaruh positif terhadap

		kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor). (Yaqin & Jatmiko, 2018)	1. Kontribusi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 2. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 3. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3.	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Riandani, 2017)	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. (Puspasari & Purnama, 2018)	1. Sumber daya manusia dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Kualitas data tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem

		keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Dukungan Manajamen puncak tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. 4. Kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. 5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Sukoharjo. (Maesaroh, 2018)	1. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif Kualitas Laporan Keuangan. 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

6.	Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM terhadap kualitas Laporan Keuangan. (Hartono & Ramdany, 2020)	1. Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. (Apriansyah et al., 2020)	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8.	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun Anggaran 2015. (Mahardini & Miranti, 2018)	1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

9.	Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Laila & Agustini, 2016)	1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 5. Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan apakah ada pengaruh antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah dengan variabel bebas yaitu terdiri dari penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian *intern*, kompetensi staf akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kerangka penelitian ini memiliki tujuan untuk mempermudah jalannya pemikiran pada permasalahan yang dipaparkan. Berikut kerangka konseptual yang dapat digambarkan dengan model seperti berikut:

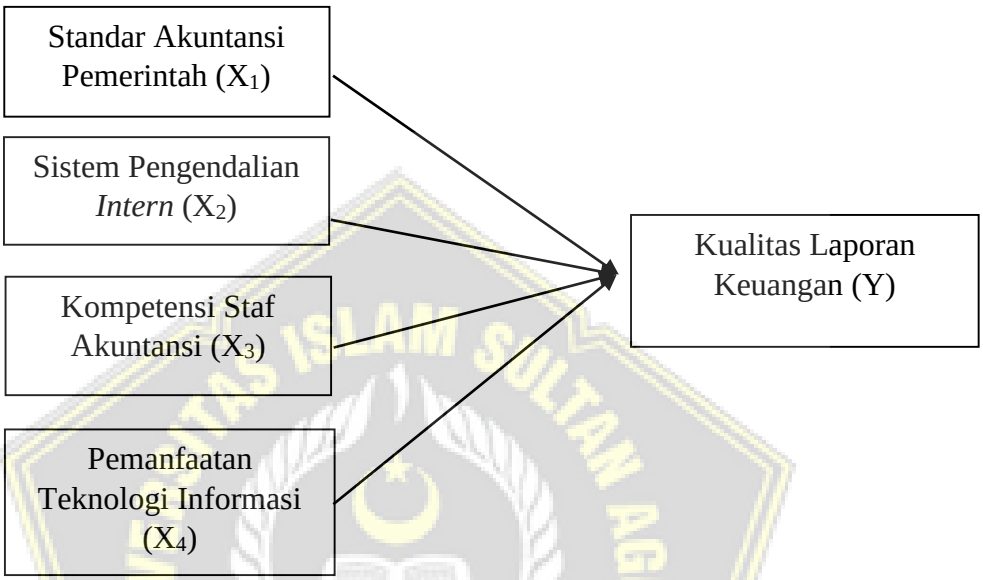

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) menerangkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang dirancang untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berjalan atas dasar pedoman yang terstruktur sehingga dapat menciptakan output laporan keuangan yang berkualitas dan berkredibilitas yang dapat memberikan informasi bagi penguna laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini memiliki arti bahwa semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintah maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar pada penjelasan hasil kesimpulan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang keterkaitan hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.

H_1: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.5.2 Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasar pada (Presiden Republik Indonesia, 2008) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) merupakan rangkaian proses pelaksanaan kegiatan serta tindakan yang berjalan secara terus menerus sebagai upaya untuk pencapaian tujuan melalui program kerja yang efektif dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan berkredibilitas, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan pengendalian *intern* yang melibatkan peran pemerintah sebagai *agent* yang mempunyai kewajiban membuat dan merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) agar dapat mewujudkan keinginan *principal* mendapatkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Jika didalam instansi pemerintahan terdapat SPI yang tinggi, maka proses penyusunan dan penyajian data-data akuntansi dapat dipantau

sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan laporan keuangan dan mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartono & Ramdany, 2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian *intern* maka semakin besar kemungkinan kualitas laporan keuangan akan tercapai. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis:

H_2 : Sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.5.3 Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi merupakan kemampuan dalam diri individu untuk mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuannya dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan. Kompetensi dalam diri manusia dapat dikembangkan melalui tingkat pendidikan, mengikuti pelatihan (*training*) guna menambah pengalaman yang cukup dan membentuk individu yang siap untuk menyelesaikan segala bentuk tanggungjawab dalam kinerjanya. Seseorang yang memilki kompetensi yang cukup serta memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi maka dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya akan semakin efektif dan efisien serta dapat meminimalisir kesalahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahardini & Miranti, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang mempunyai arti bahwa semakin tinggi kompetensi yang

dimiliki oleh staf akuntansi maka akan semakin cermat dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Dari pemaparan penelitian terdahulu mengenai variabel kompetensi staf akuntansi, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_3 : Kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.5.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan pelaporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu agar tercipta kepastian hukum. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal merupakan tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan jaringan Sistem Informasi (SIM) disetiap instansi agar proses kinerja berjalan dengan baik serta unit antar kerja dapat berkoordinasi secara efektif. Penerapan Teknologi informasi dapat menghasilkan *output* laporan keuangan yang berkualitas serta akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi laporan keuangan lebih cepat dan akurat.

Penelitian terdahulu terkait Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh (Maesaroh, 2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang memiliki arti pemanfaatan teknologi dapat memperkuat kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut (Zaluchu, 2020) adalah penelitian yang menggunakan alat pengumpul data dengan angket yang menghasilkan data berupa angka, tabulasi dengan perhitungan menggunakan metode analisis statistik kemudian hasilnya akan menjadi suatu kesimpulan ilmiah berdasarkan fakta. Penelitian kuantitaif digunakan untuk menguji terkait fenomena yang dirumuskan dalam variabel yang dibuktikan dengan landasan teori. Data penelitian ini berupa angka yang diperoleh dari alat pengumpul data dan jawaban dari setiap pertanyaan memiliki bobot tersendiri. Penelitian ini dilakukan pada kantor OPD di Kabupaten Pati.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yaitu seluruh objek penelitian yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah. Populasi dalam penelitian ini yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati pada 51 OPD yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 20 Dinas, 4 Badan, 1 Kantor, 2 RSUD dan 21 Kecamatan. Pertimbangan pemilihan OPD pada Kabupaten Pati yaitu untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi staf akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD tersebut.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang berarti bahwa peneliti menyebarkan kuesioner pada seluruh populasi yang menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 51 OPD.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian data primer. Data diperoleh dengan cara pengamatan langsung dari subyek sebagai sumber informasi dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui kuesioner. Sumber data primer yaitu dari jawaban kuesioner yang kembali dari para responden. Kuesioner dibagikan kepada PPK-OPD (Penjabat Penatausahaan Keuangan OPD) dan Bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu pengeluaran.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam memperoleh data yang valid dan relevan untuk dapat dikembangkan serta dibuktikan agar bisa menjadi acauan untuk kebutuhan dimasa yang akan datang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survei lapangan dengan membagikan kuesioner penelitian pada PPK-OPD dan Bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu pengeluaran dengan masa waktu maksimal 2 minggu untuk pengisian kuesioner, jika dalam 2 minggu kuesioner belum diserahkan maka bisa dianggap bahwa kuesioner tersebut tidak kembali. Penilaian kuesioner penelitian ini menggunakan model skala *Likert* yang digunakan untuk mengukur tentang persepsi, sikap, dan pendapat responden yang akan dijabarkan menjadi indikator variabel (Suwandi et al., 2018) dengan skala 1-5 dan memiliki skor sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1
2. Tidak Setuju (TS) skor 2
3. Netral (N) skor 3
4. Setuju (S) skor 4
5. Sangat Setuju (SS) skor 5

3.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Indikator

3.5.1 Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Hubungan variabel dependen dengan variabel independen dapat digambarkan dengan besar tingkat perubahan variabel dependen bergantung pada variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen (bebas) ialah variabel yang mampu memberi stimulus untuk dapat mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi staf akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable

3.5.2.1 Variable Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Tingkat perubahan variabel dependen bergantung

pada variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan yaitu ukuran normatif yang sifatnya wajib dinyatakan dalam penyusunan informasi akuntansi untuk mencapai *goals* suatu organisasi.

3.5.2.1. Variable Independen

Variabel Independen (bebas) ialah variabel yang mampu mempengaruhi atau memberi stimulus untuk dapat mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi staf akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu pedoman dalam prinsip akuntansi yang diimplikasikan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pemerintahan pusat dan daerah memilki kewajiban dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasar pada ketentuan yang ada didalam standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum.
2. Sistem pengendalian *intern* (SPI) adalah proses yang struktur dengan aktivitas yang kompleks untuk mewujudkan *goals* instansi dengan cara melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat menjaga keandalan laporan keuangan, perlindungan dan pengamanan terhadap aset negara, serta patuh terhadap peraturan dalam undang-undang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2008.

3. Kompetensi staf akuntansi merupakan Sumber daya manusia yang berkompeten khusus dibidang keuangan atau akuntansi yang memiliki peran penting dalam suatu instansi untuk mewujudkan informasi keuangan yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Pemanfatan Teknologi Informasi yaitu suatu informasi yang diolah dan dikombinasikan melalui perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)*. Perangkat lunak seperti database dan jaringan internet. Sedangkan perangkat keras *(hardware)* meliputi komputer beserta dengan jenis alat pendukung elektronik lainnya

Berdasarkan uraian definisi variabel diatas, maka indikator dari variabel dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Kualitas Laporan Keuangan	Karakteristik laporan keuangan	1. Relevansi laporan keuangan 2. Laporan keuangan yang andal 3. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 4. Laporan keuangan dapat dipahami oleh semua *user*.	(Haerul Triyanto, 2017)

2.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Penyajian laporan keuangan sesuai dengan dasar standar akuntansi yang berlaku	1. Pencatatan menggunakan basis akrual 2. Pencatatan sesuai fakta yang terjadi 3. Penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu.	(Maesaroh, 2018)
3.	Sistem Pengendalian *Intern*	Lingkungan Pengendalian	1. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan 2. Pimpinan atau jabatan tertinggi memberikan contoh yang sesuai dengan SOP kepada bawahan	(Haerul Triyanto, 2017)
		Aktivitas Pengendalian	1. Mengotorisasi setiap transaksi 2. Pemisahan fungsi tugas dan tanggungjawab 3. Pengeluaran dan pemasukan uang didokumentasikan atau dicatat secara urut sesuai dengan aturan yang berlaku	(Haerul Triyanto, 2017)

		Penilaian Risiko	1. Penilaian terhadap analisis risiko 2. Pemimpin mempunyai cara tersendiri yang sesuai dengan SOP untuk mencegah dan mengatasi risiko prosedur akuntansi.	(Haerul Triyanto, 2017)
		Pemantauan	1. Adanya sidak untuk mencegah penyimpangan	(Haerul Triyanto, 2017)
		Informasi dan Komunikasi	1. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan yang ditetentukan 2. Pemeriksaan audit.	(Haerul Triyanto, 2017)
4.	Kompetensi Staf Akuntansi	Tanggung Jawab	1. Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.	(Haerul Triyanto, 2017)
		Pelatihan	1. Telah mendapatkan pelatihan khusus dibidangnya.	(Haerul Triyanto, 2017)

		Pengalaman	1. Mempunyai pengalam dalam bidang akuntansi.	(Haerul Triyanto, 2017)
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Komputer	1. Pengolahan data menggunakan komputer. 2. Perawatan dan pemeliharaan komputer.	(Haerul Triyanto, 2017)
		Jaringan Internet	1. Jaringan internet stabil dan memadai dalam menunjang kinerja akuntan 2. Menggunakan koneksi sesuai dengan kebutuhan	(Haerul Triyanto, 2017)
		Keahlian pengguna	1. Menguasai *software* word, excel, MYOB, dan lainnya	(Haerul Triyanto, 2017)

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji kebaikan model, dan pengujian hipotesis dengan bantuan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 26.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu untuk menentukan deskripsi suatu variabel pencarian meliputi mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Metode analisis ini dapat dikatakan sebagai kegiatan mengelompokkan komponen yang relevan dari keseluruhan data agar data tersebut mudah dikelola. Analisis statistik deskriptif merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena memuat data numerik sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami penyajiannya.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pengumpulan data penelitian yang menggunkan metode kuesioner perlu adanya pengukuran terhadap kemampuan pada masing-masing *point* guna memperoleh *point* yang relevan. Jika ditemukan suatu *point* yang tidak relevan maka akan berpengaruh pada hasil penelitian dan tidak dapat mendeskripsikan peristiwa yang sebenarnya. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji realibilitas.

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas suatu pengujian yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran data atas suatu pernyataan yang absah untuk digunakan dalam pengukuran suatu varibel penelitian. Uji validitas ini menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* dengan cara menghitung korelasi dari setiap skor pada tiap butir pernyataan kuesioner dengan total skor. Pengujian ini dilakukan dengan nilai signifikan ($< \alpha = 0{,}05$) maka kuesioner tersebut valid, apabila nilai signifikan ($> \alpha = 0{,}05$) maka kuesioner tersebut tidak valid.

3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu pengujian untuk mengukur kestabilan hasil dari observasi kuesioner yang dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda. Pengukuran dalam uji realibilitas suatu kuesioner yaitu menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Apabila *Cronbach Alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner atas variabel tersebut dinyatakan reliabel/andal.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yaitu terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini tidak menggunakan Uji Auto Korelasi dikarenakan dalam penelitian ini tidak menggunakan data *time series.*

3.6.3.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian memiliki fungsi yang bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya model regresi yang digunakan dan kenormalan nilai residual pada uji t dengan anggapan distribusi harus normal. Jika terjadi suatu penyimpangan maka pengujian ini dapat menjadi tolak ukur untuk data yang tidak valid pada model yang dihasilkan khusus pada sampel kecil. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirov* dengan tingkat signifikan (> 5%) berarti data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan apakah model regresi memilki korelasi antar variabel independen (bebas). Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variane inflation factor* (VIF). Apabila *tolerance*

memiliki nilai > 0,01 dan VIF bernilai < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas pada model.

3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini memiliki fungsi untuk pengujian terhadap model regresi apakah ada ketidaksamaan antar varian residual antara data penelitian satu pengamat dengan pengamat lainnya. Deteksinya dengan cara mengunakan uji *glesjer*. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat heterodastistas dengan nilai signifikansi uji *glesjer* (> 0,05)

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengetahui arah pengaruh hubungan yang terjadi antara variabel bebas sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian *intern*, kompetensi staf akuntansi, penerapan teknologi informasi dengan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagi berikut :

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2\ + \beta 3\ X3 + \beta 4\ X4 + e}$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

α : Konstanta

β1 : Koefisien Sistem Akuntansi Pemerintah

β2 : Koefisien Sistem Pengendalian Internal

β3 : Koefisien Kompetensi Staf Akuntansi

β4 : Koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi

X1 : Sistem Akuntansi Pemerintah

X2 : Sistem Pengendalian Internal

X3 : Kompetensi Staf Akuntansi

X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

e : *Error*

3.6.5 Uji Kebaikan Model

3.6.5.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F berfungsi untuk melihat semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model apakah dapat berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat atau dengan kata lain pengujian ini untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi uji F dapat dilihat pada tingkat nilai ($\alpha = 0{,}05$). Apabila nilai signifikan (< 0,05) maka hipotesis diterima, jika nilai signifikan (> 0,05) maka hipotesis ditolak.

3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*)

Uji koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat nilai pada uji ini yaitu berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan kecil artinya adanya keterbatasan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan mendekati angka satu berarti variabel independen memiliki kaitan informasi yang kuat dalam menjelaskan variabel dependennya.

3.6.6 Pengujian Hipotesis

3.6.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial berfungsi untuk mengetahui adanya pengaruh kemampuan pada setiap variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian t yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan Hipotesis
   a. $H_0 : \beta_1 \leq 0$, memiliki arti bahwa variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

      $H_a : \beta_1 > 0$, memiliki arti bahwa variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.
   b. $H_0 : \beta_2 \leq 0$ memiliki arti bahwa variabel independen sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

      $H_a : \beta_2 > 0$, memiliki arti bahwa variabel independen sistem pengendlian internal berpengaruh positif terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.
   c. $H_0 : \beta_3 \leq 0$, memiliki arti bahwa variabel independen kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

      $H_a : \beta_3 > 0$, memiliki arti bahwa variabel kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

d. $H_0 : \beta_4 \leq 0$, memiliki arti bahwa variabel independen pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

   $H_a : \beta_4 > 0$ memiliki arti bahwa variabel independen pemanfaatn teknologi informasi berpengaruh positif terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan.

2. Menentukan Kriteria Pengujian
   a. Tingkat signifikan $\alpha = 0{,}05$
   b. Derajat Kebebasan (dk) pada t tabel $(\alpha/2;(n-k+1))$

      Keterangan : $\alpha = 0{,}05/2$

      k = jumalah variabel bebas

      n = Jumlah sampel

3. Tolak ukur penerimaan/penolakan yaitu:
   a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak.
   b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang terletak pada bagian timur provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan EPT Tahun 2002 kabupaten Pati memiliki luas 150.368 Ha dengan batas utara yaitu kabupaten jepara dan laut jawa, pada batas selatan terletak di kabupaten Grobogan, batas barat kabupaten Kudus dan Jepara, batas timur terdapat di kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan. Struktur Organsasi Pemerintah kabupaten pati yaitu terdiri dari 51 OPD yang meliputi :

1. 2 Sekretariat (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD)
2. 1 Inspektorat
3. 20 Dinas
4. 4 Badan
5. 1 Kantor
6. 2 RSUD
7. 21 Kecamatan

Berdasarkan (Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPT RSUD RAA Soewondo Pati, 2019) dan (Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPT RSUD Kayen Kabupaten Pati, 2019) bahwa UPT RSUD RAA Soewondo Pati dan UPT RSUD Kayen Kabupaten Pati merupakan instansi milik pemerintah Kabupaten Pati yang memiliki otonomi dalam

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian. Dengan menimbang pasal 10 ayat (1) (Peaturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah) menjelaskan tentang urusan pemerintah dibidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis dinas daerah, terdapat rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Berdasarkan (Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pola Tata Kelola RSUD Kayen, 2019) menerangkan bahwa RSUD Kayen merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna keleluasaan dalam mengelola keuangan dan menerapkan bisnis yang sehat dalam upaya meningkatkan layanan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa RSUD Kayen dan RSUD RAA Soewondo merupakan UPT yang menerapkan BLUD bukan lagi OPD dengan artian bahwa instansi tersebut mempunyai keleluasaan dalam tata kelola keuangan karena mempunyai tujuan bisnis yang sehat dan meningkatkan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa menilai keuntungan tetapi dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.

4.1.2 Data Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemrintah, SPI, Kompetensi Staf Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Kabupaten Pati dengan melakukan

penyebaran kuesioner yang disampaikan langsung kepada responen dengan teknik sampel jenuh yaitu pada 49 OPD karena 2 instansi sudah tidak termasuk dalam kategori OPD yaitu RSUD RAA Soewondo dan RSUD Kayen. Responden dalam penelitian ini yaitu Penjabat Penatausaha Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu Pengeluaran. Dalam penyebaran kuesioner, peneliti memerlukan waktu selama kurang lebih 2 bulan, kuesioner yang kembali sejumlah 106 kuesioner dari yang dikirim sebanyak 108 kuesioner, kemudian kuesioner yang dapat dioah peneliti sejumlah 99 kuesioner, karena terdapat 7 kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Kuesioner yang telah diisi sesuai dengan kriteria ditabulasikan di *Micosoft Office Excel 2016* yang selanjutnya diolah data menggunakan program aplikasi *SPSS versi 26.*

Tabel 4. 1 Data Penyebaran Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	108
2.	Kusioner yang tidak kembali	(2)
3.	Kuesioner yang kembali	106
4.	Kuesioner yang tidak lengkap	(7)
5.	Kuesioner yang dapat diolah	99
*Respon rate = 99/108*100%*		91,7%

Sumber: Output SPSS lampiran ke 3

Data identitas responden dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan jabatan.

Tabel 4. 2 Identitas Responden

No	keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	44 Orang	44,4%
	b. Perempuan	55 Orang	55,6%
Total		99 Orang	100%
2.	Usia		
	a. < 25 tahun	1 Orang	1%
	b. 25 - 45 tahun	58 Orang	58,6%
	c. > 45 tahun	40 Orang	40,4%
Total		99 Orang	100%
3.	Latar Belakang Pendidikan		
	a. Ekonomi/Akuntansi	35 Orang	35,3%
	b. Non Ekonomi/Akuntansi	64 Orang	64,7%
Total		99 Orang	100%

4.	Tingkat pendidikan a. SLTP b. SLTA c. D3 d. S1 e. S2	1 Orang 12 Orang 7 Orang 62 Orang 17 Orang	1% 12,1% 7,1% 62,6% 17,2%
		99 Orang	100%
5.	Lama Bekerja a. < 5 tahun b. 5 - 10 tahun c. 10 - 20 tahun d. > 20 tahun	4 Orang 8 Orang 59 Orang 28 Orang	4% 8,1% 59.6% 28,3%
	Total	99 Orang	100%
6.	Jabatan a. PPK-OPD b. Bendahara Pengeluaran c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	46 Orang 45 Orang 8 Orang	46,5% 45,4% 8,1%
	Total	99 Orang	100%

Sumber: Output SPSS lampiran ke 4

1. Pada poin pertama menunjukkan bahwa sebanyak 44 atau 44,4% responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan 55 orang atau 55,6% responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan.
2. Pada poin kedua terdapat usia responden yang dibawah 25 tahun sebanyak 1 orang atau 1%, usia antara 25 sampai 45 tahun terdapat 58 orang atau 58,6%, dan usia lebih 45 tahun sebanyak 40 orang atau 40,4%.
3. Pada poin ketiga terdapat karakteristik responden yang bisa ditinjau dari segi latar pendidikan akuntansi sebesar 38 orang atau 35,3%, dan sebanyak 64 orang atau 64,7% berlatar belakang pendidikan bukan dari latar pendidikan akuntansi.
4. Pada poin keempat terdapat tingkat pendidikan responden yaitu sebanyak 1 orang atau 1% dari tingkat pendidikan SLTP, 12 orang atau 12,1% dari tingkat pendidikan SLTA, sebanyak 62 orang atau sebanyak 62,6% dari tingkat pendidikan Strata 1, dan dari Strata 2 (Pasca sarjana) sebanyak 17 orang atau 17,2%.
5. Pada poin kelima terdapat karakteristik responden yang ditinjau dari sisi lama bekerja terdapat sebanyak 4 orang atau 4% bekerja selama kurang dari 5 tahun, kemudian sebanyak 8 orang atau 8,1% bekerja selama 5-10 tahun, sebanyak 59 orang atau 59,6% bekerja selama 10-20 tahun, dan sebanyak 28 orang atau 28,3% bekerja selama lebih dari 20 tahun.
6. Pada poin keenam terdapat karakteristik responden ditinjau dari segi jabatan yaitu sebanyak 46 orang atau 46,5% yang menduduki jabatan sebagai PPK-OPD atau kasubag keuangan, sebanyak 45 orang atau 45,4% sebagai

bendahara pengeluaran, dan sebanyak 8 orang atau 8,1% sebagai pembantu bendahara pengeluaran.

4.2 Analis Data

4.2.1 Analis Statistik Deskriptif

Data deskriptif dapat menggambarkan keadaan responden untuk dapat dijadikan informasi tambahan dalam memahami hasil penelitian. Hasil dari penyebaran kuesioner dalam uji ini dapat dijelaskan pada deskripsi pada masing-masing variabel.

4.2.1.1 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Indikator dalam penelitian ini mempunyai 8 unit pertanyaan. Perhitungan frekuensi indikator-indikator dari variabel kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Indikator	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	
1.	Relevan	0	0%	1	1%	0	0%	56	57%	42	42%	99	100%
2.	Relevan	0	0%	0	0%	1	1%	54	55%	44	44%	99	100%
3.	Relevan	0	0%	0	0%	1	%	44	44%	55	55%	99	100%
4.	Andal	0	0%	0	0%	1	1%	46	46%	53	53%	99	100%
5.	Andal	0	0%	2	2%	11	11%	58	59%	28	28%	99	100%
6.	Andal	0	0%	6	6%	5	5%	52	53%	36	36%	99	100%
7.	Dapat dibandingkan	0	0%	1	1%	1	1%	54	55%	43	43%	99	100%

8.	Dapat dipahami	0	0%	0	0%	1	1%	57	58%	41	41%	99	100%

Sumber: Output SPSS lampiran ke 5

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai terbesar yaitu senilai 58 responden yang berpendapat setuju dari 99 responden pada item pertanyaan keandalan laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa laporan keuangan sesuai pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang menjelaskan bahwasanya laporan keuangan wajib memiliki karakteristik kualitatif.

4.2.1.2 Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Indikator dalam penelitian ini terdapat 7 unit pertanyaan. Perhitungan frekuensi masing-masing indikator dari variabel standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

No	Indikator	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	
1.	Ketepatan Waktu	0	0%	0	0%	1	1%	54	55%	44	44%	99	100%
2.	Basis Akrual	0	0%	1	1%	6	6%	62	63%	30	30%	99	100%
3.	Basis Akrual	0	0%	0	0%	5	5%	63	64%	31	31%	99	100%
4.	Pencatatan sesuai Fakta	0	0%	0	0%	4	4%	55	56%	40	40%	99	100%

5.	Pencatatan sesuai Fakta	0	0%	0	0%	6	6%	61	62%	32	32%	99	100%
6.	Pencatatan sesuai Fakta	0	0%	1	1%	16	16%	61	62%	21	21%	99	100%
7.	Pencatatan sesuai Fakta	0	0%	0	0%	10	10%	56	57%	33	33%	99	100%

Sumber: Output SPSS lampiran ke 5

Dari tabel diatas dapat ditinjau bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai terbesar yaitu senilai 63 responden yang berpendapat setuju dari 99 responden pada item pertanyaan pencatatan laporan keuangan menggunakan metode akrual. Hal ini menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah menjadi pedoman dalam hal penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah dengan pencatatan menggunakan metode akrual.

4.2.1.3 Deskripsi Variabel Independen SPI (X2)

Indikator dalam penelitian ini terdapat 11 unit pertanyaan. Perhitungan frekuensi masing-masing indikator dari variabel standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel SPI (X2)

No	Indikator	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	JUMLAH

		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	
1.	Lingkungan pengendalian	0	0%	1	1%	4	4%	53	54%	42	42%	99	100%
2.	Lingkungan pengendalian	0	0%	0	0%	4	4%	55	56%	40	40%	99	100%
3.	Lingkungan pengendalian	0	0%	1	1%	11	11 %	56	57%	31	34%	99	100%
4.	Aktivitas pengendalian	0	0%	0	0%	4	4%	65	66%	30	30%	99	100%
5.	Aktivitas pengendalian	0	0%	0	0%	8	8%	64	65%	27	20%	99	100%
6.	Aktivitas pengendalian	0	0%	0	0%	4	4%	61	62%	34	34%	99	100%
7.	Penilaian Risiko	0	0%	1	1%	19	19 %	61	61%	18	18%	99	100%
8.	Penilaian Risiko	0	0%	0	0%	9	9%	62	63%	28	28%	99	100%
9.	Pemantauan	0	0%	5	5%	19	19 %	61	62%	14	14%	99	100%
10.	Informasi dan Komunikasi	0	0%	0	0%	4	4%	54	55%	41	41%	99	100%
11.	Informasi dan Komunikasi	0	0%	0	0%	3	3%	61	62%	35	35%	99	100%

Sumber: Output SPSS lampiran ke 5

Dari tabel diatas dapat ditinjau bahwa variabel independen Sistem Pengendalian *Intern* memiliki nilai terbesar yaitu senilai 65 responden yang berpendapat setuju dari 99 responden pada item pertanyaan aktivitas pengendalian. Hal ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian *intern* harus sesuai dengan implikasi pada UU No. 60 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian *intern* harus dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberi keyakinan pada keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuahan terhadap perundang-undangan.

4.2.1.4 Deskripsi Variabel Independen Kompetensi Staf Akuntansi (X3)

Indikator dalam penelitian ini terdapat 7 unit pertanyaan. Perhitungan frekuensi masing-masing indikator dari variabel standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kompetensi Staf Akuntansi (X3)

No	Indikator	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	
1.	Tanggung jawab	0	0%	0	0%	3	3%	65	66%	31	31%	99	100%
2.	Tanggung jawab	0	0%	0	0%	4	4%	62	63%	33	33%	99	100%
3.	Tanggung jawab	0	0%	0	0%	4	4%	62	63%	33	33%	99	100%
4.	Pelatihan	0	0%	2	2%	18	18%	57	58%	22	22%	99	100%
5.	Pelatihan	0	0%	2	2%	18	18%	59	60%	20	20%	99	100%
6.	Pelatihan	0	0%	2	2%	13	13%	55	56%	29	29%	99	100%
7.	Pengalaman	0	0%	2	2%	22	22%	51	52%	24	24%	99	100%

Sumber: Output SPSS lampiran ke 5

Dari tabel diatas dapat ditinjau bahwa variabel independen Kompetensi Staf Akuntansi memiliki nilai terbesar yaitu senilai 65 responden berpendapat setuju dari 99 responden pada item pertanyaan bahwa staf akuntansi memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa

kompetensi staf akuntansi harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan memahami peran serta fungsi kinerjanya dalam hal pengelolaan laporan keuangan pemerintah agar bisa dipertanggung jawabkan.

4.2.1.5 Deskripsi Variabel Independen Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Indikator dalam penelitian ini terdapat 9 unit pertanyaan. Perhitungan frekuensi masing-masing indikator dari variabel standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

No	Indikator	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	
1.	Komputer	0	0%	0	0%	1	1%	43	43%	55	56 %	99	100 %
2.	Komputer	0	0%	0	0%	2	2%	48	49%	49	50 %	99	100 %
3.	Komputer	0	0%	0	0%	1	1%	54	55%	44	44 %	99	100 %
4.	Komputer	0	0%	4	4%	21	21%	47	48%	27	27 %	99	100 %
5.	Komputer	0	0%	3	3%	21	21%	53	54%	22	22 %	99	100 %
6.	Jaringan Internet	0	0%	0	0%	1	1%	52	53%	46	47 %	99	100 %
7.	Jaringan Internet	0	0%	2	2%	14	14%	54	55%	29	29 %	99	100 %
8.	Jaringan Internet	0	0%	0	0%	1	1%	57	58%	41	41 %	99	100 %
9.	Keahlian	0	0%	0	0%	2	2%	57	58%	40	40 %	99	100 %

Sumber: Output SPSS lampiran ke 5

Dari tabel diatas dapat ditinjau bahwa variabel independen pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai terbesar yaitu senilai 48 responden berpendapat setuju dari 99 responden pada item pertanyaan kestabilan koneksi internet dan keahlian para pengelola laporan keuangan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal sesuai dengan tugas dan pokoknya dalam penyajian laporan keuangan.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas kuesioner, yaitu dapat diketahui dengan nilai signifikan (< α = 0,05) maka kuesioner tersebut valid, apabila nilai signifikan (> α = 0,05) maka kuesioner tersebut tidak valid. Hasil perhitungan melalui *SPSS* yaitu tertera pada tabel 4.8 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Sig	Keterangan
Kualitas LK	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,000	Valid
	6	0,000	Valid
	7	0,000	Valid
	8	0,000	Valid

SAP	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,000	Valid
	6	0,000	Valid
	7	0,000	Valid
SPI	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,000	Valid
	6	0,000	Valid
	7	0,000	Valid
	8	0,000	Valid
	9	0,000	Valid
	10	0,000	Valid
	11	0,000	Valid
	12	0,000	Valid
	13	0,000	Valid
Komptensi Staf Akuntansi	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,000	Valid
	6	0,000	Valid
	7	0,000	Valid

Teknologi Informasi	1	0,000	Valid
	2	0,000	Valid
	3	0,000	Valid
	4	0,000	Valid
	5	0,000	Valid
	6	0,000	Valid
	7	0,000	Valid
	8	0,000	Valid
	9	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS lampiran ke 6

Dalam sajian tabel tersebut dapat ditinjau bahwa pada masing masing variabel memiliki nilai signifikan 0,000 (< 0,05). Maka dapat diartikan bahwa pada masing-masing indikator dari variabel independen yaitu Pengaruh Standar Akntansi Pemerintah, SPI, Kompetensi Staf Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan memiliki hasil dengan keterangan valid.

4.2.2.1 Uji Realibilitas

Uji Realibilitas dilakukan untuk iten pertanyaan yang valid. Uji ini menggunakan teknik *Cronch Alpha* yang diolah dengan program *SPSS.* Apabila nilai koefiseien ($\alpha > 0,60$) maka mempunyai predikat reliabel atau lolos uji realibilitas.

Tabel 4. 9 Uji Realibilitas

Variabel	Cronch Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Kualitas LK	0,86	8	Reliabel
Pengaruh SAP	0,88	7	Reliabel
SPI	0,89	11	Reliabel
Kompetennsi Staf Akuntansi	0,92	7	Reliabel
Pemanfaatan TI	0,89	9	Reliabel

Sumber: Output SPSS lampiran ke 7

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai Cronch Alpha (> 0,60) maka mempunyai arti bahwa variabel tersebut terbukti andal dalam pengumpulan data penelitian.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat model regresi, dan apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini berdasar pada uji *non parametic Kolmogrov-Smirnov* yaitu dengan nilai *Asymp. sig. (2-tailed)*> 0,05.

Tabel 4. 10 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N N		99
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,05646137

Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,079
	Negative	-,081
Test Statistic		, 081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,110[c]

Sumber: Output SPSS lampiran ke 8

Berdasarkan tabel pengolahan dalam program SPSS memiliki nilai *Asymp. sig. (2-tailed)* sebesar 0,110 (> 0,05) maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah adanya korelasi yang terdapat di model regresi antar variabel independen. Perhitungan uji ini yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,01 dan VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SAP	0,384	2,607	Tidak Multikolinearitas
SPI	0,332	3,009	Tidak Multikolinearitas
Komp. Staf Akt	0,392	2,554	Tidak Multikolinearitas
Pemanfaatan TI	0,374	2,674	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS lampiran ke 9

Berdasarkan tabel diatas masing-masing variabel indeenden mempunyai nilai *tolerance* > 0,01 dengan VIF < 10, dapat diartikan dalam penelitian ini pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui atau menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengematan yang lain. Apabila nilai signifikansi (> 0,05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 12 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
SAP	0,977	Tidak Heteroskedastisitas
SPI	0,594	Tidak Heteroskedastisitas
Komp. Staf Akuntansi	0,081	Tidak Heteroskedastisitas
Pemanfaatan TI	0,904	Tidak Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS lampiran ke 10

Berdasarkan tabel yang disajikan masing-masing variabel independen memiliki nilai (> 0,05). Maka dalam pengujian ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

Tabel 4. 13 Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	5,979	2,364	2,529	,013
	SAP	,327	,110	2,978	,004

	SPI	,233	,082	2,834	,006
	Kompetensi Staf Akt	,133	,091	1,452	,150
	TI	,121	,087	1,388	,168

Sumber: Output SPSS lampiran ke 11

Berdasarkan hasil dalam tabel tersebut menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = 5,979 + 0,327 X1 + 0,233 X2 + 0,133 X3 + 0,121 X4

Persamaan Regresi linear berganda dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hasil persamaan regresi memiliki nilai konstanta positif sebesar 5,979 dengan nilai signifikan 0,013 (< 0,05) maka dapat diartikan variabel independen (Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian *Intern*, Kompetensi Staf Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) dianggap konstan, maka variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan) baik atau positif..
b. Standar Akuntansi Pemerintah memiliki koefisien positif sebesar 0,327 dengan nilai signifikan 0,004 (< 0,05) yang memiliki arti bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
c. Sistem Pengendalian *Intern* memiliki koefisien positif sebesar 0,233 dengan nilai signifikan 0,006 (< 0,05) yang memiliki arti bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian *intern* maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

d. Kompetensi Staf Akuntansi memiliki koefisien positif sebesar 0,133 dengan nilai signifikan 0,150 (> 0,05) yang memiliki arti bahwa kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki koefisien positif sebesar 0,121 dengan nilai signifikan 0,168 (> 0,05) yang memiliki arti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.5 Uji Kebaikan Model

4.2.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini dilakukan untuk mengeuji secara signifikan adanya pengaruh semua variabel independen seara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 14 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model		F	Sig.
1	Regression	40,231	,000[b]
	Residual		
	Total		
a. Dependent variable: Kualitas Laporan Keuangan			
b. Predictors: (Constant), TI, SAP, Kmpt Staf Akt, SPI			

Sumber: Output SPSS lampiran ke 12

Syarat dari uji ini yaitu jika mempunyai nilai signifikan (> 0,05) maka Ha ditolak. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 40,231 dan nilai F_{tabel} senilai 2,468533 dengan nilai signifikan α sebesar 0,000 [b] (< 0,05) maka Ha diterima yang dapat diartikan bahwa semua variabel independen mempunyai

pengaruh bersama sama terhadap variabel dependen atau kualitas laporan keuangan.

4.2.5.2 Uji Koefisien Determinasi *(Adjust R Square)*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 15 Uji Koefisien Determinasi (Adjust R Square)

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	,795[a]	,631	,616	2,09976
a. Predictors: (Costant), ∑X4, ∑X1, ∑X3, ∑X2				

Sumber: Output SPSS lampiran ke 13

Berdasarkan hasil dari tabel diatas koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,616 yang berarti 61,6% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Standar Akuntansi Pemerintah, SPI, Kompetensi Staf Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan sisanya sebesar 38,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang di luar model penelitian.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat ditinjau dari nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel}.

Tabel 4. 16 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Keterangan
SAP	2,978	1,985	Diterima
SPI	2,834	1,985	Diterima
Komp. Staf Akt	1,452	1,985	Ditolak
Pemanfaatan TI	1,388	1,985	Ditolak

Sumber: Output SPSS lampiran ke 11

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa:

1. Pengujian hipotesis variabel Independen Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki perhitungan t_{hitung} senilai 2,978 > t_{tabel} senilai 1,985. Hal ini berarti H_1 yang berbunyi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat diterima.
2. Pengujian hipotesis variabel Independen Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki perhitungan t_{hitung} senilai 2,834 > t_{tabel}

senilai 1,985. Hal ini berarti H_2 yang berbunyi Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat diterima.

3. Pengujian hipotesis variabel Independen Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki perhitungan t_{hitung} senilai 1,452 < t_{tabel} senilai 1,985. Hal ini berarti H_3 yang berbunyi Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan tidak dapat diterima.
4. Pengujian hipotesis variabel Independen Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki perhitungan t_{hitung} senilai 1,388 < t_{tabel} senilai 1,985. Hal ini berarti H_4 yang berbunyi Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan tidak dapat diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan ini menjabarkan dari beberapa uji yang telah dilakukan oleh peneliti dari beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh responden secara ilmiah yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menerangkan bahwa penerapan Standar akuntansi pemerintah di OPD Kabupaten Pati mampu membantu terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan siap untuk diaudit. Standar akuntansi merupakan prinsip yang berisi aturan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam setiap OPD dapat meningkatkan mutu kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat menggambarkan suatu kinerja yang bagus dalam OPD tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang menununjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan hal yang penting dalam memengaruhi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan *Agency Theory* dalam hal ini berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah bahwasanya pemerintah dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan pedoman yang berisi tentang aturan-aturan yang berlaku umum agar sesuai dengan kepatuhan hukum sehingga *output* tersebut dapat digunakan sebagai salah satu hal untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Terdapat pengaruh positif dalam standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yaitu sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) yang memuat pencatatan akuntansi dalam pelaksanaan anggaran dan finansial yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menerangkan bahwa Sistem pengendalian *intern* mempunyai kontribusi yang tinggi dalam terciptanya kualitas laporan keuangan. Hal ini juga menjelaskan bahwa sistem pengendalian *Intern* merupakan suatu sistem yang mampu mendeteksi adanya kecurangan dan penyimpangan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka implikasi sistem pengendalian *intern* yang efektif pada setiap instansi OPD akan mempunyai pengaruh baik dalam mengetahui dan mendeteksi suatu tindakan yang menyimpang serta dapat mengarahkan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki karakteristik kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan (Hartono & Ramdany, 2020) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menerangkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalan *intern* maka semakin tercapainya kualitas laporan keuangan.

Penerapan *Agency Theory* dalam hal ini berkaitan dengan sistem pengendalian *intern* bahwasanya pemerintah menyusunan laporan keuangan memerlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam mendeteksi suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga *output* dari laporan

keuangan yang disajikan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan untuk tujuan dalam hal membuat keputusan.

Terdapat pengaruh positif dari peneltian variabel sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan sesuai dengan (Presiden Republik Indonesia, 2008) bahwa implementasi sistem pengendalian *intern* pemerintah harus dilakukan menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk melindungi keamanan informasi dan data akuntansi yang andal serta efisien dalam pelaporan keuangan sehingga dapat terciptanya kepastian hukum.

4.3.3 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa di instansi OPD Kabupaten Pati cenderung kurang memiliki staf akuntansi yang berkompeten dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Hasil Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laila & Agustini, 2016) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena kompetensi pada sub bagian akuntansi atau pengelola keuangan akan memengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan, oleh sebab itu sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahardini & Miranti, 2018) menjelaskan bahwa

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan *Agency Theory* dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi staf akuntansi bahwa staf akuntansi sebagai *agent* dalam praktikknya kurang berkompeten dalam bidang pekerjaannya namun menggunakan hak dan kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menunjukkan bahwa pekerjaan yang dijalani berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak *principal*.

Terdapat hasil tidak berpengaruh signifikan pada kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan karena kompetensi staf akuntansi pada OPD Kabupaten Pati kurang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten sesuai bidangnya yaitu sebesar 35,3% berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi dan 64,7% berlatar belakang non ekonomi/akuntansi. Hal ini dapat berpengaruh dalam kinerja dan tanggung jawabnya dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dalam hal ini kompetensi staf akuntansi yang bertugas dibidang pengelolaan keuangan di pemerintah daerah dapat dimaksimalkan untuk mencapai *goals* laporan keuangan yang berkualitas.

4.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati. Hal ini menerangkan bahwa dalam kinerja menyusun laporan keuangan memerlukan seperangkat penunjang alat bantu

komputerisasi dan *software* yang lengkap dengan terpenuhi jadwal pemeliharaanya secara teratur serta terdapat jaringan internet yang stabil untuk kinerja staf akuntansi sebagai pegawai pengelola keuangan. Hal ini diharapkan mampu membantu secara cepat mendeteksi kesalahan data sehingga pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara tepat waktu sehingga mencapai kepatian hukum.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riandani, 2017) bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualias laporan keuangan. Hal ini disebabkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia tidak dapat memanfaatan fasilitas teknologi informasi yang ada dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Berbeda dengan pnelitian yang dilakukan oleh (Maesaroh, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan *Agency Theory* dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi bahwasanya pemerintah yang berperan sebagai *agent* kurang mampu untuk memberikan fasilitas untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Dalam hal ini pihak *principal* tidak mempunyai pintu yang luas dalam mengakses informasi keuangan maupun informasi tentang kinerja di suatu lembaga pemerintahan.

Terdapat hasil tidak berpengaruh signifikan pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan karena di instasi OPD Kabupaten Pati dalam pemanfaatan teknologi informasi kurang efisien serta perangkat

komputerisasi yang kurang perlu membutuhkan perawatan yang *intens* dan pasti memerlukan biaya yang cukup banyak. Dalam tabel deskripsi mengungkapkan bahwa responden berpendapat tidak setuju pada item pertanyaan yang menggambarkan jadwal pemeliharaan komputer secara tepat waktu dan koneksi jaringan internet yang stabil. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kurang intesifnya perawatan komputer dan jaringan internet tidak stabil dapat menghambat kinerja staf akuntansi untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2005) bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, hal ini sangat penting karena dapat membantu staf akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan transparan dalam pengungkapannya. Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah) menjelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih cepat dan tepat waktu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan agar terciptanya kepastian hukum. Dalam hal ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam setiap instansi pemerintah sehingga dapat menunjang kinerja staf akuntansi dalam tercapainya laporan keuangan yang berkualitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil pengujian data dengan variabel penelitian pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian *intern*, kompetensi staf akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintah terbukti dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Pati. Hal ini menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas.
2. Sistem Pengendalian *Intern* terbukti dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Pati. Hal ini menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian *intern* disetiap penyusunan laporan keuangan dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mendeteksi tindakan yang menyimpang.
3. Kompetensi Staf Akuntansi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa OPD di Kabupaten Pati kurang memiliki staf akuntansi yang berkompeten sesuai bidang pekerjaannya.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabepaten Pati. Hal ini karena fakta di lapangan masih ada kendala dalam hal perawatan komputerisasi dan koneksi internet yang kurang stabil.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terdapat manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan wacana dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pemerintahan yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi terciptannya kualitas laporan keuangan dan untuk perbandingan untuk penelitian.

a. Dari penelitian ini Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan penerapan *Agency Theory* bahwasanya pemerintah sebagai *agent* yang penyusun laporan keuangan memerlukan pedoman yang sesuai dengan aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sehingga *principal* dapat menerima laporan keuangan tersebut secara relevan dan tidak menyesatkan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
b. Dari penelitian ini Sistem Pengendalian *Intern* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan penerapan *Agency Theory* bahwasanya pemerintah sebagai *agent* dalam menyusun laporan keuangan memerlukan suatu sistem yang dapat

mendeteksi segala penyimpangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan aturan agar mencapai kepatuhan hukum. Hal ini dapat mendorong terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

c. Dari penelitian ini Kompetensi Staf Akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan penerapan *Agency Theory* bahwasanya fakta dilapangan pemerintah sebagai *agent* yang kurang berkompeten dalam bidang pekerjaan mementingkan kepentingan pribadi dengan menununjukkan bahwasanya *agent* telah melakukan kinerja sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh *principal*. Hal ini dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah bahwasanya sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang pekerjaan mampu meningkatkan kinerja suatu instansi.

d. Dari penelitian ini Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan penerapan *Agency Theory* bahwasanya fakta dilapangan menunjukkan pemerintah sebagai *agent* kurang mampu memberikan fasilitas yang nyaman bagi pengelola keuangan dalam memanfaatkan teknologi informsi secara maksimal, sehingga *principal* kurang mempunyai akses untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Hal ini dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat segera dilaksanakan secara maksimal.

5.2.2 Implikasi Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah, khususnya pada instansi OPD Kabupaten Pati untuk memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan tentang hal-hal yang dapat berpengaruh dalam terciptanya laporan keuangan.
b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pandangan baru bagi pengguna laporan keuangan terkait fenomena yang terjadi pada kualitas laporan keuangan dilingkup pemerintahan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini memilki *R Square* senilai 61,6% dengan sisianya sebesar 38,4% dapat dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian pada OPD Kabupaten Pati dan tidak menggunakan periode dalam pengamatannya.
3. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner tanpa ada teknik pendukung lainya seperti halnya wawancara dan dokumentasi.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang berpotensi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena dalam tabel *Adjust R Square* dijelaskan bahwa sebesar 38,4% dapat dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sempel, objek penelitian dan menambahkan periode dalam pengamatannya.
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kompetensi staf akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diikuti dan diterapkan di berbagai kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Admaja, D. D. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id

Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *JAR: Jambi Accounting Review*, *1*(1), 44–62.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020*. https://www.patikab.go.id/v2/id/opini-lkpd-2020-wtp/

BPK Perwakilan Provinsi Jateng. (n.d.). *LHP LKPD BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah*. Retrieved January 23, 2022, from https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/

Peaturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah, (2019).

Haerul Triyanto. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektorat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo) Daerah* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. http://repository.umy.ac.id

Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh SAP, Pengendalian Intern Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, *9*(1), 14–23.

Kurniawansyah, D. (2018). Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi ; Pendekatan Positivist Dan Principle-Agen. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, *3*(2), 435–446. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.122

Laila, Y. N., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi, Volume 14*,(1), 56–64.

Maesaroh, K. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. http://repository.ums.ac.id

Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, *5*(1), 22. https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola RSUD Kayen, (2019).

Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 tentang Pembentukan UPT RSUD RAA Soewondo Pati, (2019).

Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Pembentukan UPT RSUD Kayen Kabupaten Pati, (2019).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2005).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2004).

Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (2005).

Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (2010).

Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *2*(2), 145. https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, *20*(2), 8–17.

Rahmawati, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Ssistem Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pati) [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id

Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3–28. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395

Sihite, R. N., & Holiawati. (2017). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & InvestasiAset (Akuntansi Riset)*, *9*(2), 81–92.

Suwandi, E., Imansyah, F. H., & Dasril, H. (2018). Analisis Tingkat Kepuasan Menggunakan Skala Likert pada Layanan Speedy yang Bermigrasi ke Indihome. *Jurnal Teknik Elektro*, 11.

Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.18196/rab.020116

Zaluchu, S. E. (2020). Di Dalam Penelitian Agama. Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat,. *Jurnal*, *4*, 28–38.